

Dinamika Multikulturalisme dan Multilingualisme dalam Masyarakat Jepang

Ni Putu Luhur Wedayanti^{1)*}, Ni Made Andry Anita Dewi²⁾, Ni Putu Candra Lestari³⁾

^{abc} Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Udayana

Pos-el: luhur_wedayanti@unud.ac.id

The Dynamics of Multiculturalism and Multilingualism in Japanese Society

Abstract

The dynamics of globalisation and demographic issues have forced Japan to open its doors wide to accept an increasing influx of migrant workers. The homogeneous and monolingual background of Japanese society is often cited as the cause of pros and cons regarding the presence of foreigners in Japan. Multiculturalism and multilingualism are ideologies that are contrary to the monoculturalism and monolingualism of Japanese society. This ideology has led to a society that is less accepting of differences in cultural and linguistic backgrounds within its own country, demanding assimilation or cultural adaptation that is not mutually agreed upon.

Keywords: Japanese, Multiculturalism, Multilingualism,

Abstrak

Dinamika globalisasi dan permasalahan demografi membuat Jepang harus membuka lebar-lebar negaranya untuk menerima arus pekerja migran yang semakin deras. Latar belakang masyarakat Jepang yang homogen dan monolingual sering disebut sebagai pemicu pro dan kontra terhadap keberadaan orang asing di Jepang. Multikulturalisme dan multilingualisme menjadi ideologi yang berlawanan dengan monokulturalisme dan monolingualisme masyarakat Jepang. Ideologi tersebut mengantarkan masyarakatnya kurang menerima perbedaan latar belakang budaya dan bahasa lain di negaranya, dan menuntut adanya asimilasi atau adaptasi budaya yang tidak terjadi secara mutual.

Kata kunci: Jepang, Multikulturalisme, Multilingualisme

1. Pendahuluan

Pada masa globalisasi saat ini, hampir mustahil untuk menemukan negara atau tempat yang murni terisolasi tanpa koneksi atau komunikasi dengan pihak dari luar komunitasnya. Bahkan pada Jaman Edo saat Jepang mengisolasi diri dari dunia luar, keshogunan saat itu masih berhubungan dengan beberapa negara untuk kepentingan ekonomi, seperti dengan Belanda dan Tiongkok, serta dengan Korea dan Ryukyu (saat itu masih kerajaan) (Kazui, 1982). Sebagai negara modern dengan perekonomian yang kuat, Jepang sedang menghadapi berbagai masalah terkait demografi penduduk. Jumlah penduduk usia produktif yang semakin berkurang, membuat Jepang harus mendatangkan

tenaga kerja imigran dari beberapa negara untuk mengisi sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja. Kedatangan para tenaga kerja asing ini, tidak selalu diterima hangat dengan tangan terbuka, sebagian dari masyarakat Jepang mengkhawatirkan perbedaan latar belakang budaya dan bahasa dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat di negara tersebut. Beberapa artikel daring menulis mengenai adanya protes dari sekumpulan masyarakat Jepang yang meminta para imigran untuk mengikuti norma atau budaya Jepang¹. Ketidakpuasan masyarakat Jepang terhadap keberadaan para imigran asing juga terepresentasi dari adanya dukungan masyarakat terhadap partai politik yang mempropagandakan “Japanese First”². Tidak ketinggalan, Perdana menteri Jepang saat ini Sanae Takaichi menerapkan pengetatan persyaratan penerimaan pekerja migran, dan penegakan aturan legal bagi para imigran di Jepang dengan alasan bahwa pengaruh asing dapat mengganggu budaya adi luhung Jepang³.

Kebijakan pemerintahan baru Jepang saat ini, membuat banyak negara pemasok tenaga kerja migran ke Jepang memperhatikan perubahan kebijakan yang mungkin berdampak bagi tenaga kerja mereka. Dengan mencuatnya berbagai isu sosial terkait pengaruh budaya asing di Jepang dan narasi pemurnian budaya asli Jepang, artikel ini berupaya membahas dinamika multikulturalisme dan multilingualisme di Jepang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan studi pustaka dengan mengoptimalkan referensi terkait. Studi pustaka memungkinkan penelitian ini dilakukan dengan efisien mengingat referensi akademik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi maupun pustaka lainnya dapat diakses dan tersedia luas(Ofoedu, 2025). Referensi yang didapat kemudian dikaji secara kritis, untuk memberikan hasil analisis yang runut dan objektif sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Dari referensi yang didapatkan, data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pada sub kajian dalam pembahasan. Pembahasan mencakup analisis-analisis yang berdasar pada informasi objektif yang ditemukan dalam pustaka yang dikaji.

¹ <https://www.scmp.com>

² <https://edition.cnn.com/2025/07/21>

³ <https://migrantimes.com>

3. Kajian Pustaka

Istilah mengenai *nihonjinron*, mengemuka sebagai kajian mengenai Jepang, baik itu karakter, pola pikir dan segalanya seputar Jepang (Burgess, 2005; Hariyadi, 2012). Dan istilah ini, dianggap sebagai kajian yang hanya dapat dilakukan oleh peneliti dalam negeri, karena keunikan Jepang disebut hanya dapat dideskripsikan secara benar dan akurat oleh orang Jepang(Hammond & Hein, 1992; Kashiwazaki, 2016).

Multikulturalisme didefinisikan sebagai suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, sehingga konsep ini dianggap mengakui setiap entitas kultur termasuk keberagaman beragama (Hariyadi, 2012). Melengkapi definisi tersebut, Suparlan menyarikan definisi multikultural sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan menganggungkan perbedaan, dalam arti perbedaan-perbedaan individual atau orang per orang dan berbedaan budaya. Ideologi multikulturalisme ini dibedakan dengan ideologi monokultur yang menekankan pada penyeragaman atau kesatuan kebudayaan melalui proses-proses penyatuan kebudayaan yang berbeda-beda, ke dalam sebuah kebudayaan yang dominan dan mayoritas. Konsep tersebut juga dapat dibedakan dengan asimilasi yang membuat entitas budaya minoritas harus mengganti jati dirinya mengikuti atau menjadi sama dengan kelompok atau suku bangsa yang dominan, dan mengadopsi cara-cara hidup atau kebudayaannya yang baru (Suparlan, 2002).

Pada tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang (MIC) memberikan definisi terhadap multikulturalisme sebagai “*Local multicultural coexistence refers to people of different cultures and ethnic backgrounds living alongside one another as contributors to civil society, and the building of bridges between each other through the acceptance of each other's culture*” (Nagy, 2012). Dari beberapa definisi mengenai multikulturalisme di atas, dapat dipahami bahwa multikultur merupakan suatu situasi dalam satu komunitas atau area, yang masyarakatnya terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda (termasuk juga bahasa, keyakinan, sudut pandang, ataupun perbedaan latar belakang lainnya) dan tetap hidup berdampingan, yang mana setiap perbedaan kebiasaan dapat tetap dilakukan dengan adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat tersebut.

Menambahkan konsep sebelumnya mengenai keberaamana, aspek bahasa juga menunjukkan adanya heterogenitas tergantung latar belakang penuturnya. Situasi

keberagaman berbahasa atau disebut multilingualisme dalam suatu masyarakat umumnya terdapat pada negara atau kawasan yang memang heterogen, seperti Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan budaya dan bahasa yang berbeda, begitu pula negara Swiss, atau Kanada yang penduduknya umumnya menguasai lebih dari dua bahasa. Oleh karena itu, multilingualisme dapat didefinisikan sebagai situasi dimana masyarakat suatu komunitas menguasai lebih dari dua bahasa untuk berkomunikasi secara aktif (Tri et al., 2024). Situasi multilingualisme ini dapat terwujud melalui interaksi sosial yang tinggi antara komunitas dengan bahasa yang berbeda, atau melalui pendidikan, dan melalui migrasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dinamika Multikulturalisme di Jepang

Bersamaan dengan meningkatnya perekonomian negara Jepang pada tahun 1980an, masyarakat Jepang mendatangkan cukup banyak tenaga kerja asing untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang kurang populer dan enggan dikerjakan oleh masyarakat Jepang. Pekerjaan tersebut umumnya dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus sehingga upahnya cukup rendah, atau dikenal dengan kelompok pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan merepotkan (3K = *Kiken, kitanai, kitsui* ‘berbahaya, kotor, berat’) (Hariyadi, 2012; Vogt, 2015) . Di samping itu, terdapat beberapa faktor lain yang memotivasi kedatangan para pekerja tersebut ke Jepang pada masa itu, diantaranya kondisi ekonomi yang meningkat, dan nilai yen yang tinggi dibandingkan mata uang negara lain di sekitarnya. Para pekerja migran yang datang umumnya tinggal berkelompok pada area-area tertentu, seperti misalnya di Osaka, di Kobe, atau di area-area lainnya. Kemudian, istilah *tabunka* atau multikultur mulai banyak dibicarakan di Jepang saat setelah bencana gempa besar di Kota Kobe pada tahun 1995 (*Great Hanshin Iwaji Earthquake*). Para sukarelawan yang membantu pasca gempa di sentra-sentra penanggulangan bencana, kerap mengujarkan “*tabunka*” (*multicultural*) karena kawasan imigran di Kota Kobe menjadi area yang sangat terdampak (Kashiwazaki, 2016).

Fenomena mengenai peliyanan (*othering*) pada kelompok yang berbeda memang bukan cerita baru di Jepang. Sehingga bukan tanpa alasan terdapat peribahasa *deru kui wa utareru* ‘Paku yang menonjol akan dipalu’. Peribahasa tersebut menjadi cermin bahwa

penyeragaman menjadi esensial dalam masyarakat Jepang, bahwa perbedaan diupayakan untuk diminimalisir atau bahkan dieliminasi. Kelompok minoritas suku Ainu pun disangkal keberadaannya dan harus menyembunyikan identitasnya untuk mendapat hak sebagai warga negara, seperti mendapat pendidikan yang layak dan kesempatan bekerja yang setara (Abe, 2018; Bukh, 2010; Godefroy, 2012; Tsutsui, 2013). Hanya pada tahun 2019, keberadaan Suku Ainu diakui oleh Pemerintah Jepang sebagai masyarakat adat asli Jepang yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri⁴. Sedangkan daerah lain, seperti masyarakat di kepulauan Okinawa, ataupun para pekerja imigran masih menerima sikap diskriminatif dari pejabat politik yang meyakini keunggulan Jepang semata-mata karena ideologi mereka yang homogen⁵. Kedatangan para imigran dari berbagai tempat, tentu membawa juga latar belakang kebudayaan mereka masing-masing. Masyarakat Jepang memahami negaranya sebagai negara yang homogen(Brown, 2013; Burgess, 2005; Hammond & Hein, 1992; Widiandari, 2021), dan istilah *tabunka* atau multikultur lebih pada wacana untuk mengenali situasi keberagamana suku-suku yang berbeda di dalam negeri. Di Jepang, konsep mengenai multikultur lebih mengacu pada keberadaan kelompok minoritas dalam negerinya seperti eksistensi suku ainu dan kelompok minoritas di pulau Okinawa(Hammond & Hein, 1992; Kashiwazaki, 2016).

Dan saat ini Jepang yang banyak disebut sedang mengalami penurunan populasi dengan jumlah penduduk non-produktif hampir menyaingi jumlah penduduknya yang produktif (Uesugi, 2010). Kenaikan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Jepang pada tahun 2010 mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat semenjak tahun mulai berdatangannya pekerja imigran pada 1980an (Hariyadi, 2012; Kashiwazaki, 2016; Vogt, 2015). Pemerintah Jepang kemudian mempekerjakan tenaga kerja asing dari Asia Tenggara, diantaranya adalah tenaga kerja yang berasal dari Vietnam, Filipina, Indonesia dan Thailand untuk bekerja di sektor-sektor informal. Tenaga kerja yang datang ke Jepang ini dituntut memiliki banyak kompetensi untuk bekerja pada basis-basis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja di Jepang. Salah satunya adalah mampu memahami karakter dan budaya masyarakat Jepang. Pada beberapa universitas di Indonesia, kurikulum pengajaran bahasa Jepang disisipkan mata kuliah yang bermuatan budaya dan pranata masyarakat, yang bertujuan untuk membekali pembelajar bahasa Jepang

⁴ [Council for Ainu Policy Promotion: Government of Japan](#)

⁵ [What is behind the rise of the 'Japanese First' far-right? – DW – 07/22/2025](#)

mengenai pentingnya memahami gaya komunikasi orang Jepang, bahkan sampai pada budaya korporasi masyarakat Jepang. Materi-materi tersebut bertujuan membantu pembelajar berkomunikasi dengan orang Jepang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Situasi ini menunjukkan adanya hegemoni bahwa pihak pembelajar yang suatu saat nanti mungkin akan bekerja di Jepang, harus beradaptasi dengan karakter dan budaya Jepang. Dengan proses adaptasi yang tidak mutual.

Stockwell melakukan penelitian mengenai persepsi dan sikap mahasiswa Jepang mengenai konsep multikulturalisme di Jepang. Dari 332 orang mahasiswa yang ikut serta, sebanyak 97,9 % respondennya menyatakan bangga (sangat bangga) terhadap Jepang dan budayanya. Sebanyak 80% dari mereka menyadari bahwa Bahasa dan budaya Jepang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami oleh pembelajar yang merupakan orang asing, dan sebesar 59 % melihat bahwa kedatangan para imigran belum tentu menjadi ancaman nasional berupa meningkatnya tindak kejahatan. Dan mengenai kedatangan para pekerja imigran ke Jepang, sebanyak 63 % menyebutkan ketidakkhawatiran akan persaingan lapangan pekerjaan, karena pekerja asing dianggap hanya mampu mengisi pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja manual tanpa memerlukan keterampilan khusus (*unskilled manual labor*) yang umumnya tidak diminati anak muda Jepang (Stockwell, 2021). Hasil penelitian tersebut, menunjukkan adanya sikap superior terhadap pekerja imigran, yang disebut hanya mampu mengisi porsi pekerjaan kurang bergengsi. Meskipun demikian, para pekerja imigran yang berasal dari berbagai latar belakang budaya tersebut juga memiliki peran signifikan dalam perputaran ekonomi sektor-sektor formal dan nonformal di Jepang. Sehingga sikap meliyankan anggota masyarakat dan menuntut asimilasi budaya seharusnya diminimalisir dan definisi multikultur dapat menyasar setiap lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada bidang pendidikan, atau sektor fashion atau makanan semata.

Keberagaman yang dikarenakan latar belakang negara yang berbeda, lebih disetuju sebagai internasionalisasi. Penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul karena pekerja imigran, seperti kendala bahasa, pelayanan publik dan perumahan dilakukan secara desentralisasi, sesuai dengan kondisi para imigran di masing-masing daerah di Jepang (Hammond & Hein, 1992). Beberapa pemerintah daerah telah membuat kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan pekerja imigran untuk dapat hidup berdampingan dengan warga lokal di daerahnya.

4.2 Multilingualisme di Jepang

Konsep mengenai multilingual tersebut dibatasi pada kondisi dimana individu-individu dalam suatu masyarakat dapat menggunakan lebih dari dua bahasa. Masih menjadi perbincangan dalam kajian Sosiolinguistik untuk memberikan garis yang jelas mengenai seseorang dapat dikategorikan sebagai multilingualis. Apakah hanya dengan memahami saja, atau dapat memproduksi dan memahami aktif lebih dari dua bahasa, baru kemudian dapat dikategorikan sebagai multilingualis. Negara seperti Swiss dengan letak geografis berbatasan darat dengan beberapa negara lain, menyebabkan penduduknya melakukan kontak bahasa dengan masyarakat dari negara sekitarnya. Hal ini membuat Swiss memiliki lebih dari satu bahasa nasional, yaitu Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Italia, dan Bahasa Romans. Indonesia juga merupakan negara yang masyarakatnya merupakan penutur bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa daerah dan bahasa nasional digunakan dalam situasi yang berbeda, dan bahasa nasional dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada bahasa daerah.

Daerah-daerah yang memiliki ideologi bahasa yang monolingual umumnya secara geografis letaknya terisolir dari daerah lainnya, sehingga hanya sedikit kontak yang terjadi dengan orang dari luar daerahnya. Negara Jepang sebagai negara kepulauan, sangat lumrah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang menggunakan bahasa daerah yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Pada masa sebelum Pemerintahan Meiji, masyarakat Jepang saat itu juga menggunakan bahasa daerah yang sistem maupun strukturnya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan bahasa Jepang daerah Tokyo. Akan tetapi, karena adanya kebijakan penyeragaman dan standarisasi bahasa Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang dialek Tokyo sebagai parameter utama, kelompok-kelompok minoritas diminta untuk menggunakan bahasa Jepang standar dan meninggalkan bahasa daerahnya (Heinrich, 2012; Konakahara & Tsuchiya, 2020; Sadacone, 2019). Bahasa Jepang daerah Tokyo digunakan sebagai bahasa standar atau pengantar di kelas, dan murid-murid yang menggunakan bahasa daerah (dari Bahasa Ainu sampai Ryukyu) akan mendapat hukuman berupa *language tag* (Anderson, 2019). Kelompok masyarakat minoritas yang berbahasa berbeda, dilarang untuk berbicara menggunakan bahasanya, dan dipaksa untuk menggunakan Bahasa Jepang standar dialek Tokyo.

Kebijakan ini berdampak panjang, karena pemerintah Jepang menganggap bahasa-bahasa yang digunakan di daerah sebagai sebuah dialek, atau subbahasa (Wiyatasari & Timur, 2019). Penelitian yang membuktikan bahwa bahasa di kawasan Okinawa memiliki sistem dan struktur yang berbeda dengan Bahasa Jepang standar telah dilakukan (Heinrich, 2022), tetapi tetap saja mayoritas masyarakat Jepang dan pemerintah Jepang menganggap bahasa di daerah Okinawa sebagai sebuah dialek dan bukan sebuah bahasa. Pengakuan publik terhadap eksistensi sebuah bahasa dapat membantu proses revitalisasi bahasa-bahasa tersebut dari ancaman kepunahan, dan dapat menumbuhkan sikap positif serta kesetiaan berbahasa bagi penuturnya.

Saat ini, sangat banyak orang asing yang berkunjung ke Jepang, dengan daerah kunjungan wisatanya tidak terbatas di kota-kota besar semata, tetapi juga sudah sampai ke area dearah yang cukup di pelosok desa. Dalam hal ini, Jepang telah menyesuaikan pemarkah atau tanda jalan yang informatif dengan menggunakan huruf latin di hampir sebagian besar daerah di Jepang. Sistem tulis Jepang yang menggunakan huruf Hiragana, Katakana, Kanji, dan Romaji mempengaruhi pembentukan keberagaman linguistik di Jepang. Bahasa Jepang tetap sebagai bahasa nasional yang menunjukkan budaya otentik, Bahasa Inggris di Jepang kerap diasosiasikan sebagai internasionalisasi, atau modernisasi.

5. Simpulan

Masyarakat yang multikultural dan multilingual dan dapat hidup berdampingan secara harmonis merupakan cita-cita ideal segenap bangsa di dunia. Kemajuan teknologi, arus migrasi barang dan jasa tidak lagi terbatas pada jarak dan waktu. Dinamika demikian membawa kontak dan interaksi orang antar budaya dan bahasa yang berbeda semakin tinggi, dan sangat dibutuhkannya pemahaman lintas budaya. Saat ini, Jepang sebagai salah satu negara tujuan migrasi, menerima kedatangan para imigran dua kali lipat lebih banyak dari tahun 1980an. Kedatangan para imigran dimotivasi oleh faktor internal negara Jepang yang memang membutuhkan tenaga kerja usia produktif, dan faktor eksternal yaitu pencari kerja yang mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang Jepang dengan mata uang negara asalnya.

Kedatangan para tenaga kerja asing dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa menjadi isu nasional yang penting karena adanya kekhawatiran budaya yang

dibawa mempengaruhi budaya asli Jepang. Isu mengenai konflik akibat dari masyarakat yang heterogen, menjadi wacana yang digunakan secara politis di lingkup nasional. Sedangkan di daerah-daerah di Jepang, beberapa kebijakan diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan para imigran dapat hidup berdampingan dengan penduduk lokal. Di samping itu juga, informasi publik di daerah-daerah di Jepang, sebagian besar telah ditulis dengan huruf latin, yang memudahkan pengunjung dengan latar belakang yang lebih luas memahami informasi-informasi tersebut.

Ucapan terima kasih

Penelitian ini didanai oleh HIBAH PNBP Universitas Udayana TA 2024 dengan nomor : B/255.171/UN14.4.A/PT.01.03/2024

6. Daftar Pustaka

- Abe, C. (2018). Establishment of the Ainu Indigenous People's Film Society. *Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir, October 2014*, 99–102. <https://doi.org/10.22459/ie.2018.10>
- Anderson, M. (2019). Language shift in the Ryukyu Islands. In *In Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics*. Routledge. <https://doi.org/10.7202/022032ar>
- Brown, E. S. (2013). Racialization in a ‘homogenous’ society? The case of Buraku people in Japan. *Asian Ethnicity*, 14(1), 37–41. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.689556>
- Bukh, A. (2010). Ainu identity and Japan’s identity: The struggle for subjectivity. *Copenhagen Journal of Asian Studies*, 28(2), 35–53. <https://doi.org/10.22439/cjas.v28i2.3428>
- Burgess, C. (2005). *Jepang yang multikultur? Wacana dan mitos homogenitas [1] Chris Burgess Translated by Dipo Siahaan with the assistance of Susy Nataliwati, Muhammad Surya and Danarto Suryo Yudo*.
- Godefroy, N. (2012). The Road from Ainu Barbarian to Japanese Primitive: A Brief Summary of Japanese-Ainu Relations from Edo to Meiji. *Consortium Making a Difference - Representing/Constructing the Other in Asian and African Media, Cinema and Languages: Consortium of African and Asian Studies (CAAS)*, 1–10.
- Hammond, E., & Hein, L. E. (1992). Multiculturalism in Japanese Perspective. *The Journal of American-East Asian Relations* 1, 145–169.
- Hariyadi, E. (2012). Homogenitas Versus Multikulturalisme: Perdebatan Penerimaan Pekerja Asing di Jepang. *Thaqafiyyat*, 415–430.
- Hashimoto, K., & Glasgow, G. P. (2019). *CLIL for Who? Commodification of English-Medium Courses in Japan's Higher Education* (pp. 103–119). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14386-2_6
- Heinrich, P. (2012). The Making of Monolingual Japan. In *The Making of Monolingual Japan. Multilingual Matters*. <https://doi.org/10.21832/9781847696588>

- Heinrich, P. (2022). Language Communities in Japan. In J. C. Maher (Ed.), *Language Communities in Japan* (pp. 1–258). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198856610.001.0001>
- Kashiwazaki, C. (2016). Multicultural Discourse and Policies in Japan: An Assessment of Tabunka Kyosei. *The Gakushuin Journal of International Studies*, 3.
- Kazui, T. (1982). Society for Japanese Studies Foreign Relations during the Edo Period: Sakoku Reexamined (S. D. Videen, Trans.). *Source: The Journal of Japanese Studies*, 8(2), 283–306.
- Kimura, M. (2025). *A Study of Current Pronunciation Issues of Japanese English Learners*. Mukogawa Women's University.
- Konakahara, M., & Tsuchiya, K. (2020). *English as a Lingua Franca in Japan Towards Multilingual Practices*. Palgrave macmillan.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-33288-4>
- Nagy, S. (2012). Japanese-style Multiculturalism? A Comparative Examination of Japanese Multicultural Coexistence. *The Japan Association for Language Teaching*, 18.
- Ofoedu, N. A. (2025). Trends and Methodological Approaches in Academic Library Research : A Bibliometric Study. *AJEMATES*, 15(1).
- Sadakane, K. (2019, August). “Multilingualism” in the World and Sociolinguistic Study in Japan. *Language Policy and Planning Conference*.
- Stockwell, E. (2021). In principle or in practice? Investigation of Japanese university students’ perceptions and attitudes toward multiculturalism in Japan. *Journal of International and Intercultural Communication*, 14(2), 164–183.
<https://doi.org/10.1080/17513057.2020.1772343>
- Suparlan, P. (2002). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, vi.
- Tri, N., Saptadi, S., Maulani, G., Wardoyo, T. H., & Hadikusumo, R. A. (2024). *Pendidikan Multilingual: Teori dan Praktik* (S. Nurmela, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Tsutsui, K. (2013). Ainu Indigenous Rights Movement (Japan). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*.
<https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm230>
- Uesugi, L.-M. C. (2010). Productive ageing in japan. *China Journal of Social Work*, 3(2–3), 165–180. <https://doi.org/10.1080/17525098.2010.492638>
- Vogt, G. (2015). Foreign workers in Japan. In *The SAGE Handbook of Modern Japanese Studies* (pp. 567–582). SAGE Publications Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781473909908.n32>
- Widiandari, A. (2021). Keberadaan Kelompok Minoritas: Mitos Homogenitas Bangsa Jepang. *Kiryoku*, 5(2), 249–256. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i2.249-256>
- Wiyatasari, R., & Timur, D. M. (2019). Sikap Bahasa Penutur Shimakutuba Dialek Uchinaguchi di Prefektur Okinawa. *Kiryoku*, 3(1), 37–44.